

**UPAYA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP USAHA
PERTAMBANGAN DI KALIMANTAN TENGAH**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum**

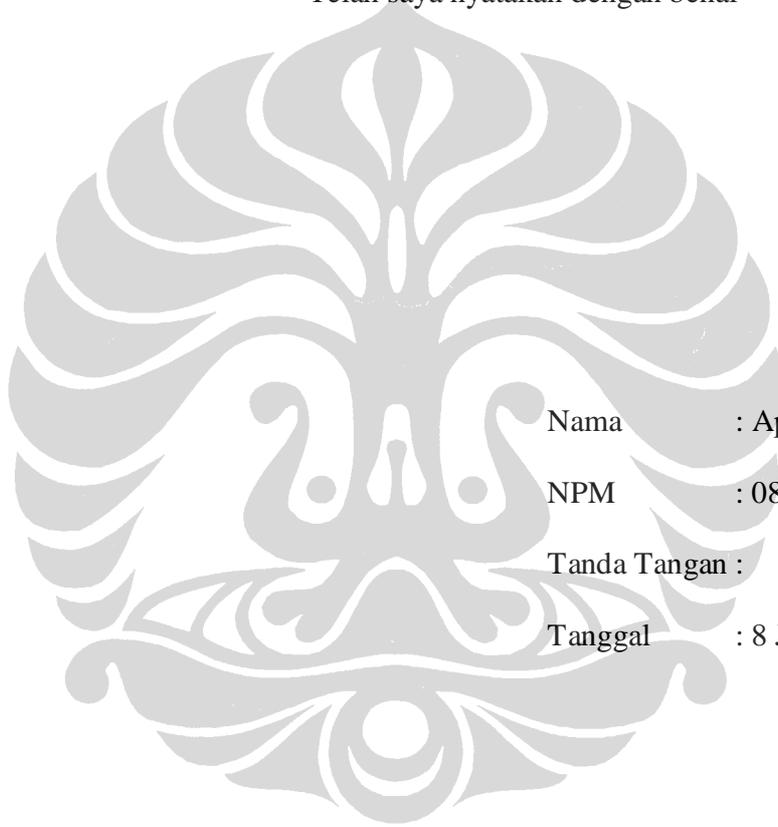
**NAMA : APRAE VICO RANAN
NPM: 0806425052**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
JAKARTA
JANUARI 2010**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
Dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk
Telah saya nyatakan dengan benar



Nama : Aprae Vico Ranan

NPM : 0806425052

Tanda Tangan :

Tanggal : 8 Januari 2010

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Aprae Vico Ranan
NPM : 0806425052
Program Studi : Hukum Ekonomi
Judul Tesis : Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Dalam
Melakukan Pengawasan Terhadap Usaha
Pertambangan Di Kalimantan Tengah

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing/Penguji : Dr. Nurul Elmiyah, SH., MH ()
Penguji : Achmad Budi Cahyono, SH., MH ()
Penguji : Abdul Salam, SH., MH ()

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : Januari 2010

KATA PENGANTAR

Penyusun mengucapkan Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena Kemuliaan dan Kebesaran-Nya serta curahan kasihNya yang tiada henti, akhirnya penyusunan tesis dengan judul “ Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Untuk Meningkatkan Iklim Investasi Di Sektor Pertambangan Di Kalimantan Tengah”, telah penyusun selesaikan. Atas bimbingan-Nya lah penyusun selalu mempunyai motivasi dan semangat tinggi dalam menghadapi dan mengatasi semua kendala yang ada selama proses penyusunan tesis ini.

Maksud dan tujuan dari penyusunan tesis ini adalah sebagai syarat utama untuk meraih gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penyusun menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna karena masih terdapat kekurangan, keadaan ini salah satunya disebabkan karena terbatasnya pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh penyusun. Oleh karena itu, untuk kesempurnaan tesis ini dan agar kesalahan yang ada dapat diperbaiki, penyusun akan menerima masukan dalam bentuk saran dan kritik dari semua pihak.

Pada kesempatan ini juga, penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada pihak-pihak yang telah tulus membantu dalam proses penyusunan tesis ini, khususnya ditujukan kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda penulis Erman P. Ranan dan Liseptie dan keluarga besar penyusun yang selama ini telah memberikan dukungan moral, materiil, dan doa selama ini;
2. Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. sebagai pembimbing tesis yang telah meluangkan waktu, memberikan masukan dan pengarahan selama penyusunan tesis;
3. Achmad Budi Cahyono, SH., MH dan Abdul Salam, SH., MH yang telah bersedia menjadi dewan penguji tesis dan banyak memberikan masukan yang sangat penting;
4. Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H. selaku ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia;

5. Bapak dan ibu dosen / staf pengajar / staf administrasi Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan ilmunya dan membantu penulis selama menjalani masa perkuliahan;
6. Bapak Jacobson dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berdiskusi mengenai masalah-masalah pertambangan yang dihadapi di Kalimantan Tengah;
7. Seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan penulis satu persatu disini.

Atas semua kebaikan dan bantuan yang telah diberikan tersebut, penyusun mendoakan kiranya dilimpahkan balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Pengasih. Akhir kata dengan harapan semoga tesis ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penyusun dan bagi pembaca pada umumnya.

Jakarta, Januari 2010

Aprae Vico Ranan

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aprae Vico Ranan

NPM : 0806425052

Program Studi : Hukum Ekonomi

Departemen :

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Usaha Pertambangan Di Kalimantan Tengah”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 8 Januari 2010

Yang menyatakan

(Aprae Vico Ranan)

ABSTRAK

Nama : Aprae Vico Ranan
Program Studi : Hukum Ekonomi
Judul : Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Usaha Pertambangan di Kalimantan Tengah.

Tesis ini membahas mengenai kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan ijin pertambangan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Selain itu juga membahas tentang investasi sektor pertambangan di Kalimantan Tengah. Hasil dari pengawasan ini akan digunakan sebagai bahan masukan untuk dasar melakukan perbaikan-perbaikan dalam rangka mengoptimalkan sektor pertambangan sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian ini menggunakan kajian hukum normatif. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan wawancara. Penelitian ini menyarankan agar Pemerintah Provinsi melibatkan Dinas terkait dalam melakukan pengawasan terhadap usaha pertambangan yang dikelola Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah perlu diberikan kewenangan untuk mewajibkan audit lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan tertentu yang beresiko tinggi terhadap lingkungan hidup dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Kata kunci: Kalimantan Tengah, Pengawasan, Pertambangan

ABSTRACT

Name : Aprae Vico Ranan
Study Program : Economic law
Title : Central Borneo Provincial Government Efforts in Conducting Control The Mining Business In Central Borneo.

This thesis describes the authority possessed by the Provincial Government of Central Borneo in conducting control of management of mining license and environmental by city/regency government. Moreover also discuss of the mining sector investment in Central Borneo. The results of this monitoring will be used as inputs for make improvement in order to optimize the mining sector so can gives maximum contribute for economic growth of Central Borneo. This research uses normative legal studies. The data was collected through literature research and interviews. This research suggests that the Provincial Government of Central Borneo involving related agency in supervise the mining business managed by city/regency government and local government need to be given the authority to require an environmental audit against business and/or certain activity at high risk against environment and/or responsible business and/or activities that demonstrate disobedience against legislation.

Key words: Central Borneo, Control, Mining.

DAFTAR ISI

| | | |
|---|--|------|
| Halaman Sampul | | i |
| Halaman Judul | | ii |
| Halaman Pernyataan Orisinalitas | | iii |
| Halaman Pengesahan | | iv |
| Kata Pengantar | | v |
| Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah Untuk Kepentingan Akademis | | vii |
| Abstrak | | viii |
| BAB 1 | PENDAHULUAN | |
| 1.1 | Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 | Rumusan Masalah | 8 |
| 1.3 | Tujuan Penelitian | 8 |
| 1.4 | Kerangka Teori Dan Konsep | 8 |
| 1.5 | Metodologi Penelitian | 14 |
| 1.6 | Sistematika Penulisan | 16 |
| BAB 2 | PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI INDONESIA | |
| 2.1 | Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. | |
| 2.1.1 | Sejarah pengaturan pertambangan di Indonesia | |
| 2.1.1.1 | Masa Pemerintahan Hindia Belanda (1800-1942) | 18 |
| 2.1.1.2 | Periode 1942-1949 | 19 |
| 2.1.1.3 | Periode 1950-1966 | 20 |
| 2.1.1.4 | Periode 1967-2008 | 22 |
| 2.1.1.5 | Periode 2009 – sekarang | 24 |
| 2.1.2 | Kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara | |
| 2.1.2.1 | Kewenangan Pemerintah Pusat | 26 |
| 2.1.2.2 | Kewenangan Pemerintah Provinsi | 28 |
| 2.1.2.3 | Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota | 30 |
| 2.2 | Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. | 31 |
| 2.2.1 | Kewenangan Pemerintah Pusat | 32 |
| 2.2.2 | Kewenangan Pemerintah Provinsi | 35 |
| 2.2.3 | Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota | 36 |

| | | |
|----------------|--|-----|
| 2.3 | Peranan Perizinan dalam Pembangunan Di Daerah. | |
| II.3.1 | Konsep Dasar Perizinan | 38 |
| II.3.2 | Konsep Dasar Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Perizinan | 41 |
| II.4 | Hubungan antara Lingkungan Hidup dengan Usaha pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | |
| II.4.1 | AMDAL sebagai syarat utama penerbitan ijin | 44 |
| II.4.2 | Audit Lingkungan | 46 |
| II.5 | Pengawasan dan Pelimpahan Wewenang. | |
| II.5.1 | pengawasan | 48 |
| II.5.1.1 | Pengawasan Preventif | 50 |
| II.5.1.2 | Pengawasan Represif | 51 |
| II.5.2 | Pelimpahan wewenang | |
| II.4.2.1 | Dekonsentrasi | 52 |
| II.4.2.2 | Tugas pembantuan | 54 |
| BAB III | UPAYA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TERHADAP PENGAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA. | |
| III.1 | Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara oleh Pemerintah Kabupaten/Kota | 56 |
| III.2 | Pengawasan terhadap pengelolaan ijin usaha pertambangan dan pengelolaan lingkungan hidup | |
| III.2.1 | Pengawasan terhadap pengelolaan ijin usaha pertambangan | 66 |
| III.2.2 | Pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan hidup | 71 |
| BAB IV | INVESTASI PERTAMBANGAN DI KALIMANTAN TENGAH. | |
| IV.1 | Gambaran Kalimantan Tengah secara umum | |
| V.1.1 | Keadaan umum | 77 |
| V.1.2 | Potensi pertambangan di Kalimantan Tengah | 79 |
| IV.2 | Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Untuk Meningkatkan Iklim Investasi Di Sektor Pertambangan Di Kalimantan Tengah..... | 88 |
| BAB V | PENUTUP | |
| V.1 | Kesimpulan | 100 |
| V.2 | Saran | 101 |

